

ANALISIS WACANA KRITIS BERITA TENTANG RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) BALI DALAM HARIAN *BALI POST*

I Dewa Gede Budi Utama
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Ahmad Yani No. 67, Singaraja
Ponsel 081915614535
idgbudiutama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) struktur teks, (2) kognisi sosial, dan (3) konteks sosial berita tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali. Berita ini menarik untuk dianalisis karena menjadi berita utama *Bali Post* dalam waktu yang cukup lama, pertengahan April hingga Juni 2009 serta mengandung nilai berita yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur teks berita mengenai RTRWP pada harian *Bali Post* menggambarkan pemerintah provinsi Bali sebagai inisiator RTRWP secara negatif, dan menggambarkan secara positif DPRD, akademisi, serta kepala pusat lingkungan hidup Bali Nusra, sebagai pihak yang mengkritik RTRWP. Yang kedua, kognisi sosial yang terdapat dalam berita dapat diketahui dari jenis pengetahuan yang digunakan, yaitu pengetahuan kelompok, nasional, dan pengetahuan budaya. *Bali Post* mengusung ideologi Pancasila pada satu sisi, dan prinsip *ajeg Bali* pada sisi lain. Keseluruhan pernyataan DPRD dan akademisi yang diberitakan mendukung pandangan bahwa RTRWP yang diajukan Gubernur Bali tidak baik untuk kepentingan Bali. Yang ketiga, konteks sosial yang digambarkan dalam berita RTRWP adalah mengenai Pancasila, kearifan lokal masyarakat Bali, struktur organisasi *Bali Post*, pemerintah provinsi, dan *desa adat*, serta hubungan antara *Bali Post*, DPRD Provinsi Bali, Gubernur, serta akademisi.

Kata kunci: *analisis wacana kritis, kognisi sosial, berita, dan RTRWP*

ABSTRACT

This research aimed to know (1) text structure, (2) social cognition, and (3) news social contexts about Spatial Planning (RTRWP) of Bali Province in *Bali Post*. The news is worth to be analyzed because it had been a main headline in *Bali Post* for a sufficient amount of time, from the middle of April until June, 2009 and the valuability was high. This research is designed as a descriptive qualitative study. In concerned of the result and discussion of the research, some conclusion could be presented as follow. First, text structure of the news with Spatial Planning (RTRWP) headline in *Bali Post* presented the Bali Province Government as the negative initiator, and positively presented the legislative (DPRD), academician, and the

head of Bali Nusra Environment as the critic of the issue. Second, the news social cognition could be identified from the kinds of knowledge that was being used, such as group knowledge, national, and cultural knowledge. Bali Post belief Pancasila as the ideologi, in the other side, Bali Post conveyed the principle of *Ajeng Bali*. The statements of the DPRD and academician published as a supporting view of that Spatial Planning (RTRWP) stated by the Bali Governor is not good for Bali.. Third, the news social contexts of the Spatial Planning (RTRWP) was about Pancasila, Balinese local wisdom, organization structure of Bali Post, province government, traditional village, and the relations between Bali Post, DPRD of Bali province, Governor and academician.

Keywords: *critical discourse analysis, social cognition, news, and spatial planning (RTRWP).*

PENDAHULUAN

Surat kabar dan berita sering dianggap memiliki berbagai kualitas netralitas serta otoritas yang pada kenyataannya tidak dimilikinya dan tidak dapat diharapkan secara logis untuk dimiliki olehnya (Burton, 2008:153). Jadi, berita bukanlah gambaran atas realitas, melainkan pengkonstruksian realitas yang mengandung ketidaknetralan. Ketidaknetralan tersebut tidak lepas dari peran subjektivitas wartawan dalam memandang objek yang diberitakan.

Untuk dapat memahami wacana berita yang disajikan media secara komprehensif, diperlukan perspektif kritis sehingga bahasa dan praktik kebahasaan tidak lagi dipahami sebagai alat atau medium yang netral. Salah satu model analisis wacana kritis ini adalah model kognisi sosial yang ditawarkan oleh Teun A. van Dijk. van Dijk memperkenalkan analisis kognisi sosial, yang menjadi penghubung antara wacana dan masyarakat (Meyer, 2001: 15). van Dijk menganalisis tiga dimensi wacana untuk melakukan analisis wacana secara komprehensif, antara wacana, kognisi, dan masyarakat (2008: ix).

Penelitian dilakukan terhadap berita-berita mengenai Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (RTRWP) dalam harian *Bali Post* yang muncul dan menjadi berita utama sejak pertengahan April hingga Juni 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa berita tentang

RTRWP Bali menarik, penting, dengan demikian juga memiliki berbagai nilai berita, seperti kenegatifan, konflik, dan kedekatan.

Alasan lain yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan adalah berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, pada umumnya analisis wacana kritis van Dijk tidak dilakukan secara komprehensif atau tidak melibatkan ketiga elemen wacananya, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Padahal untuk menerapkan analisis wacana kognisi sosial yang dikemukakan van Dijk, kognisi sosial dan konteks sosial tidak bisa diabaikan (2008: 16).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) struktur teks, (2) kognisi sosial, dan (3) konteks sosial berita yang dianalisis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain, khususnya dalam bidang wacana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pekerja media.

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam memberikan gambaran posisi media *Bali Post* dalam berita tentang RTRWP kepada masyarakat.

LANDASAN TEORI

Analisis wacana kognisi sosial yang dikemukakan van Dijk meliputi tiga level analisis, yaitu analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Tidak satu pun dari ketiga dimensi wacana ini dapat dipahami tanpa yang lain (van Dijk, 2008: 16). Oleh karena itu, tidak satu pun ketiganya perlu diterapkan secara terintegrasi (van Dijk, 2006). Gambaran mengenai dimensi dan elemen analisis akan digambarkan dalam tabel berikut.

Level Analisis	Yang Diamati			Elemen Analisis	Keterangan
Strukturmakro	Tematik			Tema/topik	
Struktursuper	Summary			Judul	
	Story	situasi	episode	Teras berita	
				Peristiwa utama	
				Konsekuensi	

		latar	Konteks
			Historis
	komentar	Kesimpulan	Harapan
			Evaluasi
		Reaksi verbal	Reaksi verbal
Struktur mikro	Sintaksis		Kalimat aktif/pasif;
			Nominalisasi
	Leksikon		Kata positif/negatif
	Koherensi	Distribusi informasi	Topik/penjelas
	lokal	Susunan dan koherensi	Koherensi
			Kondisional/temporal
			Koherensi fungsional
		Praanggapan	Praanggapan
	Retorik		Deskripsi langsung dan laporan saksi mata
			Sumber dan kutipan
			Nomor
			Gaya bahasa

Tabel: struktur teks (disusun berdasarkan van Dijk, 2006a; 1995; 1993; 1988a; 1988b; 1985; 1983)

Kognisi sosial wartawan digambarkan dengan mengidentifikasi bentuk pengetahuan atau *K-device* yang digunakan dalam wacana. *K-device* merupakan bentuk strategi pengelolaan pengetahuan dalam interaksi (van Dijk, 2008:255; 2005: 76). Jenis-jenis pengetahuan tersebut antara lain pengetahuan personal, interpersonal, kelompok, institusional atau organisasional, nasional, dan pengetahuan kebudayaan (van Dijk, 2005; van Dijk, 2003: 90).

Konteks sosial pada kesempatan ini hanya dibatasi pada kelompok sosial yang meliputi beberapa hal yang merupakan dasar pembentukan ideologi dan kognisi sosial (van Dijk, 1995a; 2001a:115; 2001b: 14, 2006b: 163). Analisis konteks sosial meliputi analisis struktur masyarakat (sistem keyakinan, prinsip, norma); struktur institusi dan organisasi; hubungan antar kelompok; struktur kelompok.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan deskriptif dengan metode kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan apa adanya, dan memahami makna di Bali yang tampak (Arikunto, 1998:310; Sugiyono, 2013: 46). Sumber

data dalam penelitian ini adalah harian *Bali Post* periode pertengahan April hingga Juni 2009. Subjek dalam penelitian ini adalah berita-berita tentang RTRWP Bali dalam Harian *Bali Post* sejak pertengahan April hingga Juni 2009 yang berjumlah 84 buah berita. Objek dalam penelitian ini adalah struktur teks berita tentang RTRWP Bali dalam harian *Bali Post*, kognisi sosial wartawan, dan konteks sosial berita tentang RTRWP Bali dalam harian *Bali Post*. Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen dan kajian pustaka.

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan data, yaitu menetapkan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berita-berita terkait RTRWP di harian *Bali Post*. Yang kedua, mengklasifikasi data, yaitu mengelompokkan data menurut permasalahan atau sesuai dengan batas kajian. Berita-berita yang ditemukan dibedakan menjadi berita yang menjadi berita utama (halaman pertama), bukan berita utama, serta berita iklan. Yang ketiga, menganalisis data berdasarkan teori yang telah dirumuskan. Yakni menganalisis teks, kognisi sosial, serta konteks sosial. Yang dianalisis adalah berita utama. Yang keempat, menarik simpulan sesuai dengan yang disarankan oleh seluruh data.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini meliputi pemaparan (1) struktur teks berita tentang RTRWP pada harian *Bali Post*, (2) kognisi sosial, serta (3) konteks sosial yang terdapat pada berita tersebut. Berikut ini adalah pemaparan masing-masing bagian tersebut.

Struktur Teks Berita RTRWP

Struktur teks dalam analisis ini meliputi analisis struktur makro, super struktur, dan struktur mikro. Pada struktur makro yang dianalisis adalah makna global teks yang dapat dipahami melalui tema, topik dan subtopik yang dikemukakan dalam teks. van Dijk (1988a: 35) menyatakan topik dapat ditunjukkan melalui judul berita.

Tema berita-berita tersebut adalah Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali. Tema tersebut dikhususkan dalam setiap berita menjadi topik yang dapat dilihat dari judul berita yang disajikan. Berita pertama mengandung topik ”terkait pasal ’bisnis’ dalam ranperda RTRWP, *krama* Bali harus bersikap”. Topik tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam subtopik. Subtopik yang mendukung topik tersebut antara lain: (1) aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus *balance* (par.1, kal.4), (2) RTRWP Bali mestinya juga mengatur sanksi secara khusus bagi pemimpin daerah yang salah merekomendasikan perizinan (par.2, kal.1), (3) *krama* Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpinnya mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan main (par.2, kal.3), (4) ada kecenderungan kepentingan ekonomi mengalahkan agenda penyelamatan bumi Bali (par.4, kal.2), (5) perlu adanya evaluasi yang utuh atas pengelolaan Bali dari sisi aturan dan implementasinya di lapangan (par.5, kal.1).

Pada berita kedua yang berjudul “Revisi Terhadap Perda RTRW Inisiatif Eksekutif”, tema RTRWP Bali dikhususkan pada topik revisi terhadap RTRW inisiatif eksekutif. Topik pada berita kedua ditunjang oleh subtopik sebagai berikut: 1) RTRWP banyak disorot karena banyak “pasal bisnis” di dalamnya (parg.1), 2) tata cara penyusunan RTRWP (parg.3 dan parg.4), 3) latar belakang yang membuat munculnya gagasan revisi RTRWP (parg.5), 4) RTRWP yang sedang dibahas tidak lebih baik daripada perda sebelumnya (parg.6 dan parg.7).

Judul berita ketiga yang peneliti analisis adalah “Ranperda RTRWP Bali, ODTWK Ciptakan Peluang Langgar Tata Ruang”. Topik berita ini adalah *ODTWK Ciptakan Peluang Langgar Tata Ruang*. Topik ini diturunkan menjadi subtopik sebagai berikut: 1) pembangunan akomodasi pariwisata di dua wilayah OTDWK Buleleng (Air Sanih, Kubutambahan dan Kawasan Buyan – Tamblingan) terkesan tidak terkontrol akibat ketentuan yang terkesan mudah disiasati (par.1, kal.2); 2) syarat pembangunan di daerah OTDWK

(par.3); 3) Pelanggaran ketentuan pembangunan di daerah OTDWK di Air Sanih dan Bukti hingga Desa Tembok Tejakula (par.5; 4) pelanggaran ketentuan pembangunan di daerah OTDWK di Pancasari (par.6).

Judul berita keempat yang peneliti analisis adalah “Ranperda RTRWP: Sedikitnya Ada 133 Kata ‘arahan’, 100 Poin Diatur Gubernur.” Judul tersebut mengandung tema dan topik yang disampaikan dengan jelas. Tema berita tersebut adalah RTRWP (Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi) Bali. Tema tersebut dijabarkan ke dalam topik: adanya 133 kata “Arahan”, dan 10 poin diatur gubernur. Topik ini menonjolkan informasi mengenai besarnya kewenangan yang dimiliki oleh gubernur terkait dengan penataan tata ruang wilayah Bali. Topik tersebut, dikhususnya lagi menjadi sub topik sebagai berikut: 1) Makin banyak saja terkuak kelemahan ranperda RTRWP Bali 2009, 2) banyak hal menarik yang terungkap yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat.

Pemaparan tema, topik serta subtopik pada analisis struktur makro memberikan gambaran bahwa berita tentang RTRWP pada harian *Bali Post* menggambarkan RTRWP secara negatif sehingga mengarahkan pandangan pembaca untuk tidak setuju atau menolak RTRWP tersebut. Tema, topik serta subtopik yang disusun pada berita disusun dengan struktur sehingga keseluruhan isi berita menunjang topik yang terdapat pada judul berita.

Pada tataran superstruktur, elemen wacana yang dianalisis antara lain: judul berita, teras berita, peristiwa utama, konsekuensi, konteks, historis, harapan, evaluasi, serta reaksi verbal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa superstruktur berita tentang RTRWP Bali pada harian *Bali Post* dikonstruksi untuk mencitrakan RTRWP serta pemerintah provinsi Bali secara negatif, dan sebaliknya menggiring pandangan masyarakat untuk menolak atau tidak setuju dengan ranperda RTRWP tersebut.

Pada tataran judul, ditemukan judul-judul seperti: “Terkait Pasal Bisnis, *Krama* Bali Harus Bersikap” (berita 1), “Revisi Perda RTRW Inisiatif Eksekutif” (berita 2), “Ranperda

RTRWP Bali, ODTWK Ciptakan Peluang Langgar Tata Ruang” (berita 3), Ranperda RTRWP; Sedikitnya ada 133 kata arahan, 10 poin diatur Gubernur” (berita 4). Pada judul berita pertama, *krama* yang merupakan istilah bahasa daerah Bali yang mengacu kepada anggota komunitas adat Bali, untuk bersikap. Sikap yang dimaksud tentu menolak RTRWP karena pada bagian awal judul telah disebutkan, *terkait pasal bisnis*. Yang dimaksud pasal bisnis adalah pasal-pasal yang sengaja dibuat oleh pihak yang mengajukan revisi RTRWP (gubernur) untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu saja.

Judul berita kedua dan keempat, menggiring pemahaman pembaca untuk bersikap negatif kepada eksekutif atau gubernur Bali. Pada berita kedua digambarkan bahwa eksekutiflah yang memiliki inisiatif untuk merevisi perda yang pada akhirnya tidak lebih baik daripada perda yang telah ada. Pada berita keempat digambarkan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh gubernur dalam ranperda RTRWP yang sedang diajukan. Dengan demikian, pihak eksekutif atau gubernur terkesan merevisi perda hanya untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu saja. Sementara itu, judul berita ketiga menggambarkan besarnya kemungkinan pelanggaran tata ruang pada ODTWK.

Teras berita mengenai RTRWP pada harian *Bali Post* juga menunjukkan upaya untuk menggiring pemahaman dan pandangan pembaca untuk merespons secara negatif ranperda RTRWP. Teras berita pertama misalnya, “Munculnya pasal-pasal “bisnis” pada Ranperda RTRWP Bali rupanya dikritisi juga oleh Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra, Ir. R. Sudirman, M.M. Dihubungi Kamis, (16/4) kemarin, ia mengaku sudah mendengar paparan masalah RTRWP di Gedung DPRD Bali. ‘Saya berharap jangan sampai perda ini disusun hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyelamatan alam. Antara aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus *balance*,’ tegasnya.”

Teras berita pada berita pertama merupakan kutipan pernyataan Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra. Kutipan tersebut mengandung imbauan agar penyusunan ranperda ini disusun dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali secara berimbang. Namun, oleh wartawan, himbauan itu diawali dengan kalimat: “Munculnya pasal-pasal ‘bisnis’ pada Ranperda RTRWP Bali rupanya dikritisi juga oleh Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra, Ir. R. Sudirman, M.M.”. Kata “dikritisi” menimbulkan kesan bahwa imbauan itu sebagai kritik atas RTRWP. Dengan demikian, hal tersebut juga menggiring pemahaman pembaca bahwa RTRWP memang mengandung hal-hal yang menyimpang dari kepentingan penyelamatan alam Bali karena mengandung kepentingan bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Peristiwa utama dalam berita pertama (1) adalah kritik terhadap RTRWP. Terdapat dua orang yang menjadi narasumber yang pernyataannya dikutip dalam berita dan menjadi peristiwa utama dalam berita. Narasumber yang pernyataannya dikutip sebagai teras berita adalah Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra Ir. R. Sudirman, M.M. yang menyatakan bahwa aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus *balance*. Narasumber yang kedua adalah ahli geomorfologi Unur R. Suyarto mengemukakan beberapa pandangan, antara lain: komponen masyarakat Bali harus diberi ruang yang terbuka untuk memberikan sumbang saran dalam membuat aturan, ada kesan tak ada pertimbangan ilmiah dalam penentuan kelayakan sebuah investasi, dan perlu adanya evaluasi yang utuh atas pengelolaan alam Bali dari sisi aturan dan implementasinya.

Konsekuensi dalam berita pertama terdapat pada paragraf ke-2, kalimat ke-3: “*Krama* Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpin mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan main. Proposisi ini merupakan konsekuensi atas adanya ‘pasal bisnis’ dalam RTRWP”. Proposisi ini juga menjadi judul berita.

Kata *krama* merupakan bahasa Bali yang berpadanan dengan kata warga dalam bahasa Indonesia. Istilah *krama* sering digunakan untuk mengacu kepada warga adat (*krama adat*), warga banjar (*krama banjar*), warga desa (*krama desa*). Penggunaan kata *krama* menimbulkan kesan bahwa masalah ini merupakan masalah masyarakat lokal Bali yang kepentingannya untuk menjadi dan menyelamatkan alam Bali terganggu karena pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan melalui pasal-pasal tertentu dalam RTRWP.

Meskipun, konsekuensi dinyatakan pada judul dengan proposisi “*Krama Bali harus Bersikap*”, pada bagian isi berita hingga penutup tidak terdapat pemaparan secara eksplisit mengenai sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali.

Pada berita pertama terdapat konteks yang disampaikan melalui kutipan pernyataan seorang narasumber. Kutipan yang memberikan konteks atas topik yang sedang diberitakan terdapat pada paragraf ketiga, sebagai berikut.

“*Selama ini* ada kesan tak ada pertimbangan ilmiah dalam menentukan kelayakan sebuah investasi. Ada kecenderungan kepentingan ekonomi mengalahkan agenda penyelamatan bumi Bali,” ujarnya (par.4, kal.1).

Konteks pada berita ini dapat diketahui melalui frasa “selama ini”. Frasa tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sebelumnya, namun tidak dijelaskan secara eksplisit kurun waktu tersebut, telah terjadi kekeliruan dalam pengelolaan investasi dan alam Bali. Kekeliruan tersebut disebabkan oleh terlalu diutamakannya kepentingan ekonomi, sementara kepentingan penyelamatan Bali diabaikan.

Elemen historis muncul dalam berita kedua ini, yaitu “Revisi Perda RTRW ini mencuat ke permukaan ketika muncul kasus panggung terapung di Danau Buyan. Ketika itu, Gubernur Mangku Pastika menyatakan sanksi yang diatur dalam perda itu sangat lemah, sehingga tak mampu menjangkau kasus pelanggaran di Uluwatu maupun Bukit Mimba, Karangasem” (par. 4). Dalam kutipan tersebut, jelas tersurat bahwa Gubernur Mangku Pastika memunculkan

gagasan revisi terhadap Perda RTRWP setelah kasus panggung terapung di Danau Buyan yang terjadi akibat sanksi yang diatur dalam perda tersebut sangat lemah sehingga tidak mampu menjangkau kasus pelanggaran di beberapa tempat, seperti Uluwatu dan Bukit Mimba Karangasem. Proposisi tersebut juga menyiratkan adanya keyakinan terhadap Perda RTRWP yang telah direvisi akan mampu mengatasi masalah-masalah pelanggaran wilayah. Hal ini menjadi paradoks dengan proposisi-proposisi sebelumnya, yang mengkhawatirkan lolosnya Ranperda RTRWP ini menjadi perda justru akan lebih membuat Bali “sesak napas”. Dikuatkan lagi dengan proposisi berikutnya, “Namun dari dua kali sosialisasi, sebagian besar yang diundang menyatakan revisi ini tidak lebih baik dari perda sebelumnya. Bahkan ada yang menyebutkan kemunduran. Sebab, sejumlah pasal yang sering disebut “pasal bisnis” malah memberikan peluang kepada investor untuk merambah kawasan yang selama ini disakralkan” (par. 6). Dengan demikian, wartawan ingin mengarahkan pandangan publik bahwa latar belakang munculnya gagasan revisi terhadap RTRW ini masih kurang pengkajian atau hanya karena gagasan pihak tertentu (Gubernur Bali sebagai eksekutif), padahal pihak lain, seperti para ahli, para tokoh masyarakat, justru memiliki pandangan yang sebaliknya, yaitu revisi terhadap RTRW merupakan suatu kemunduran.

Pada berita pertama, terdapat harapan pada paragraf 1, kalimat ke-3. “Oleh karena itu, *krama* Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpinnya mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan” (par. 1, kal. 3).

Sumber proposisi yang mengandung harapan ini, tidak secara jelas ditampilkan dalam berita. Selain itu, proposisi ini terletak terpisah dari kalimat dan paragraf yang mengandung kutipan pernyataan narasumber. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa proposisi ini merupakan pandangan wartawan mengenai peristiwa yang sedang diberitakan, dengan demikian tergolong sebagai harapan dalam analisis wacana ini.

Harapan yang disajikan dalam berita mengandung ajakan bagi masyarakat Bali untuk terlibat secara aktif menolak tindakan pemimpin Bali yang melanggar aturan demi mendapatkan keuntungan finansial. Penggunaan kata *krama* dalam proposisi ini menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah seluruh masyarakat yang tinggal di Bali, melainkan warga Bali yang tergabung dalam masyarakat adat yang beragama Hindu yang merupakan anggota perkumpulan masyarakat Bali yakni banjar dan desa adat.

Jika dihubungkan dengan proposisi lain dalam judul “Terkait Pasal ‘Bisnis’ RTRWP, Krama Bali Harus Bertindak”, proposisi yang mengandung harapan ini, mengandung ajakan wartawan atau media *Bali Post* kepada masyarakat Bali untuk bersama-sama menolak “pasal-pasal bisnis” dalam RTRWP.

Elemen evaluasi yang pertama adalah proposisi “Untuk mencegah praktik membijaksanai aturan, RTRWP Bali mestinya juga mengatur sanksi secara khusus bagi pimpinan daerah yang salah merekomendasikan perizinan” (par. 2, kal. 1). Proposisi ini mengandung pandangan mengenai perlunya aturan mengenai sanksi kepada pemimpin daerah yang keliru dalam merekomendasikan izin. Pandangan ini, ditulis dalam kalimat yang tidak menyampaikan sumber, sehingga peneliti menyimpulkan proposisi ini sebagai evaluasi.

Yang kedua adalah proposisi “Hal ini jarang kita dengar, karena *kerap kali* keputusan pimpinan daerah dianggap benar, padahal mungkin saja keputusan itu didasari kebijakan menyimpang” (par. 2, kal. 2). Yang dimaksud “hal ini” dalam proposisi tersebut adalah perlunya sanksi bagi pemimpin daerah yang salah merekomendasikan perizinan. Proposisi ini secara implisit menyampaikan kepada pembaca bahwa sangat kecil kemungkinan seorang pemimpin mendapatkan sanksi atas keputusannya yang keliru karena keputusan tersebut didasari oleh kebijakan atau aturan tertentu. Padahal, aturan tersebut mungkin saja sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu yang menguntungkan kepentingan pemimpin sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan aturan tersebut terkesan benar.

Yang ketiga adalah proposisi “Oleh karena itu, *krama* Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpinnya mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan” (par. 2, kal. 3). Proposisi ini menunjukkan sikap wartawan yang mengajak *krama* Bali untuk terlibat aktif dan mengambil sikap dalam penyusunan RTRWP. Yang dimaksud mengambil sikap dalam konteks ini tentu adalah menolak “pasal bisnis” dalam RTRWP karena pasal-pasal tersebut sengaja dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk pemimpin, dan mengabaikan kepentingan penyelamatan alam Bali.

Reaksi verbal tampak dalam “Saya berharap jangan sampai perda ini disusun hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyelamatan alam. Antara aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus *balance*,” tegasnya (par.1, kal.2). Kutipan pernyataan ini menjadi teras dalam berita 1. Hal ini berarti, kutipan ini dianggap penting oleh wartawan dan media, dan akan memengaruhi keseluruhan arah dan isi berita. Pada dasarnya, kutipan pernyataan tersebut bersifat netral dan tidak menyalahkan pihak tertentu karena hanya mengandung harapan dan saran agar penyusunan perda tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan penyelamatan alam Bali. Namun, kalimat yang ditulis sebelum kutipan ini membuat pemaknaan atas kutipan mungkin berbeda. Kalimat yang terletak sebelum kutipan ini adalah “Munculnya pasal-pasal “bisnis” pada Ranperda RTRWP Bali rupanya dikritisi juga oleh Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra Ir.R. Sudirman, M.M.” Penyebutan frasa “pasal bisnis yang dikritisi” membentuk persepsi pembaca bahwa memang benar terdapat pasal bisnis dalam ranperda tersebut dan kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra tidak menyetujui hal tersebut. Kemungkinan pemaknaan seperti ini tentu berbeda dengan makna kutipan tersebut.

Pada tataran mikro, pembahasan meliputi elemen nominalisasi, kata, koherensi, praanggapan, deskripsi langsung dan laporan saksi mata, sumber dan kutipan, nomor, serta gaya bahasa.

Pada tataran sintaksis, peneliti menemukan strategi nominalisasi pada kalimat: “*Munculnya pasal-pasal “bisnis” pada Ranperda RTRWP Bali* rupanya dikritisi juga oleh Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra, Ir. R. Sudirman, M.M.” (par.1, kal.1). Pada kalimat tersebut, frasa *munculnya pasal-pasal ‘bisnis’ pada Reperda RTRWP Bali* menjadi nomina dan menjadi subjek dalam berita. Perubahan verba *muncul*, menjadi nomina *munculnya* memungkinkan frasa tersebut menjadi subjek dalam kalimat dan diletakkan di bagian awal kalimat sehingga memperoleh perhatian lebih dari pembaca.

Penggunaan kalimat pasif terdapat pada berita kedua. *Revisi Perda RTRWP Bali kini banyak disorot* (par. 1, kal. 1). Kalimat ini merupakan kalimat pasif dengan pola Subjek – Keterangan – Predikat. Subjek kalimat tersebut *Revisi Perda RTRWP Bali*. Predikat kalimat tersebut adalah *kini*. Objek kalimat tersebut adalah *banyak disorot*. Dengan konstruksi kalimat tersebut, frasa *Revisi Perda RTRWP Bali* menjadi topik kalimat. Dengan menggunakan bentuk kalimat pasif, objek yang dalam hal ini pihak-pihak yang menyoroti Revisi Perda RTRWP tidak harus dihadirkan. Namun, dengan menyatakan *banyak*, dapat menimbulkan persepsi pembaca mengenai jumlah yang bisa saja lebih banyak daripada yang sebenarnya. Jadi, dengan konstruksi kalimat tersebut, wartawan atau media berupaya untuk menimbulkan kesan bahwa banyak pihak yang menyoroti masalah tersebut dan dengan konstruksi kalimat tersebut kesan yang ditimbulkan dapat lebih banyak daripada yang sebenarnya.

Bentuk kalimat aktif juga digunakan seperti pada berita ketiga. Bentuk kalimat aktif “Sebagai ODTWK, pemegang kebijakan dengan mudah menyatakan *welcome* kepada investor yang ingin membangun di daerah itu” (par.2,kal.2). Struktur kalimat tersebut adalah

keterangan – subjek – keterangan – predikat – objek – keterangan. Dengan struktur tersebut, keterangan *sebagai ODTWK* ditonjolkan dalam kalimat. Selain itu, subjek *pemegang kebijakan* juga diposisikan pada bagian awal kalimat sehingga juga mendapat penekanan sebagai pelaku yang melaksanakan tindakan *menyatakan* selamat datang kepada investor. Jadi dengan konstruksi kalimat ini, ODTWK seolah dimanfaatkan pihak penguasa untuk mendapatkan investor sebanyak mungkin tanpa terlalu memedulikan kelestarian ODTWK maupun lingkungan dan masyarakat secara umum.

Berikutnya adalah penggunaan koherensi kondisional yang terdapat pada kalimat: “Untuk mencegah praktik membijaksanai aturan, RTRWP Bali mestinya juga mengatur sanksi secara khusus bagi pimpinan daerah yang salah merekomendasikan perizinan.” Koherensi kondisional pada kalimat tersebut dapat diketahui dari penggunaan kata *untuk* yang menandakan hubungan kondisional dengan proposisi berikutnya. Dalam kalimat tersebut, frasa *untuk mencegah praktik membijaksanai aturan* disusun mendahului subjek, sehingga tujuan atau alasan memperoleh penekanan dalam kalimat. Dalam konteks ini, *membijaksanai aturan* bermakna negatif sebagai upaya akal-akalan yang bermaksud negatif untuk keuntungan pihak tertentu saja. Hal ini tentu akan berakibat buruk bagi keselamatan alam Bali. Oleh karena itu, proposisi selanjutnya: *RTRWP Bali mestinya juga mengatur sanksi secara khusus bagi pimpinan daerah yang salah merekomendasikan perizinan* sulit untuk ditolak kebenarannya oleh khalayak pembaca. Dengan kata lain, pembaca dikondisikan untuk memiliki pemahaman yang sama bahwa RTRWP Bali memang perlu mengatur sanksi bagi pimpinan daerah. Jika tidak ada aturan, seolah praktik menyiasati aturan untuk kepentingan pihak tertentu oleh pimpinan daerah akan terus terjadi.

Koherensi fungsional yang terdapat pada kalimat “Sangat mungkin terjadi aturan main sudah ideal, *namun* konsistensi pejabat publik dalam menegakkan aturan tak terbangun” (par. 4, kal. 2). Koherensi fungsional tersebut dapat diketahui dari penggunaan kata hubung *namun*

dalam kalimat. Kata hubung *namun* menunjukkan adanya hubungan pertentangan antara proposisi dalam kalimat. Pada kalimat ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa, aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah maupun aturan lainnya sebenarnya sangat mungkin sudah memadai dan telah mengatur dengan baik penggunaan wilayah daerah. Namun, yang menjadi penekanan dalam kalimat ini adalah bahwa konsistensi pejabat publik dalam menegakkan aturan tidak terbangun. Dengan kata lain, pejabat publik atau pimpinan daerah yang memiliki kecenderungan untuk mengingkari aturan yang telah ada, atau dengan menciptakan celah bagi penafsiran lain terhadap aturan yang hanya akan menguntungkan kepentingan pihak tertentu namun mengabaikan penyelamatan alam Bali.

Pada berita pertama, peneliti menemukan penggunaan pranggapan. Yang pertama adalah pada judul berita: *Terkait Pasal “Bisnis” RTRWP, Krama Bali Harus Bersikap*. Dengan proposisi *terkait pasal bisnis*, pembaca diasumsikan telah mengetahui bahwa di dalam RTRWP telah terdapat pasal yang bermotif bisnis atau keuntungan pihak tertentu dan berpotensi merugikan Bali. Dengan demikian, praanggapan atas judul tersebut adalah bahwa di dalam RTRWP memang terdapat pasal “bisnis” yang merupakan cara pemerintah membantu pihak tertentu untuk mendapat keuntungan ekonomi, namun akan merugikan alam Bali. Oleh karena itu, *krama* Bali diharapkan menyikapi hal tersebut.

Penggunaan leksikon “pasal-pasal bisnis”, “kerap kali”, “melabrak”, “mengalahkan”, “ada kecenderungan”, “ada kemungkinan”, “ada kesan” sebagaimana terdapat pada berita 1 digunakan untuk menegaskan betapa RTRWP yang dirancang pemerintah akan berdampak buruk bagi Bali. Frasa “pasal-pasal bisnis” yang terdapat pada judul berita dan teras berita. Pasal merupakan istilah yang mengacu pada bagian dari bab atau bagian di dalam undang-undang. Sementara bisnis merupakan usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kedua ini digabung menjadi sebuah frasa dengan maksud bahwa peraturan yang dibuat dalam peraturan daerah, dalam hal ini RTRWP, dibuat dengan maksud untuk memudahkan atau memberi

jalan kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan alam Bali, namun akan menimbulkan akibat yang merugikan keselamatan alam Bali. Penggunaan kata ulang, “pasal-pasal” menunjukkan bahwa, peraturan yang dirumuskan dalam butir-butir aturan dalam RTRWP tersebut berjumlah lebih dari satu. Bahkan dengan menggunakan kata ulang-pasal-pasal, kesan jumlah yang ditimbulkan bisa jadi melebihi jumlah sebenarnya. Jadi, dengan menggunakan leksikon tersebut, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa terdapat cukup banyak pasal yang dibuat untuk kepentingan bisnis sebagai upaya pihak tertentu mendapatkan keuntungan, sementara itu, di sisi lain kepentingan penyelamatan alam Bali terabaikan.

Elemen kutipan langsung ditemukan pada berita pertama, kedua, dan ketiga, dan tidak ditemukan pada berita keempat. Penggunaan gaya bahasa ditemukan juga pada berita pertama, seperti “pasal bisnis”, dan “aturan main”. Elemen retorik yang lain adalah penggunaan kalimat tak langsung seperti yang terdapat pada paragraf ketiga yakni *Suarca menyatakan Ranperda RTRWP Bali merujuk UU 26/2007 tentang penataan ruang. Rujukan itu dijadikan pedoman dalam merevisi Perda 2/2005 tentang RTRWP Bali. Selanjutnya perumusannya diserahkan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Bali. Hasil perumusannya digodok oleh sebuah tim bersama kelompok ahli.* Kutipan tak langsung ini memaparkan dasar dan tata cara perumusan ranperda RTRWP yang sedang dibahas. Namun, penjelasan yang cukup rinci dan prosedural ini terkesan menjadi pernyataan normatif setelah wartawan menyampaikan kutipan langsung yang diikuti proposisi *katanya tergesa-gesa* pada paragraf setelahnya.

Kognisi Sosial Wartawan dalam Berita tentang RTRWP Bali dalam Harian *Bali Post*

Dalam penelitian ini, tidak ditemukan keseluruhan bentuk penggunaan pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan yang digunakan dalam berita-berita tentang rancangan tata ruang

wilayah provinsi (RTRWP) Bali meliputi pengetahuan nasional, pengetahuan kebudayaan, dan pengetahuan kelompok. Ketiga jenis pengetahuan ini tampak dari penggunaan kata atau istilah. Pengetahuan nasional seperti “pasal”, “RTRWP”, “Bali”, “DPRD Bali”, “sanksi”, “eksekutif”, “biro”, “HAM”, dan “ODTWK”. Penggunaan pengetahuan kebudayaan, seperti “praktik membijaksanaan aturan”, “pertimbangan ilmiah”, “kearifan lokal”, dan “Danau Buyan”. Penggunaan pengetahuan kelompok, seperti “krama”, “Bhisama”, “PHDI”, dan “pura kahyangan jagat”.

Konteks Sosial dalam Berita tentang RTRWP Bali dalam Harian *Bali Post*

Pada aspek konteks sosial, peneliti memaparkan struktur sosial, struktur institusi atau organisasi, hubungan antar kelompok, dan struktur kelompok. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan sekaligus sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia (Kaelan, 2004: 96). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan kata lain, Pancasila merupakan cita-cita moral yang memberikan pedoman dan kekuatan bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konteks sosial yang meliputi nilai-nilai lokal masyarakat Bali tecermin dalam beberapa istilah yang digunakan, seperti “ajeg Bali”, dan “Tri Hita Karana”.

Berdasarkan empat berita yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Bali Post* memiliki posisi yang berseberangan dengan Gubernur Bali Mangku Pastika. Dalam empat berita tersebut, Gubernur Bali atau hal yang terkait dengan Gubernur Bali hanya muncul sekali dalam pemberitaan, yakni hanya pada berita kedua, paragraf 5. Dalam berita yang berjudul “Revisi Perda RTRW Inisiatif Eksekutif” tersebut, gubernur dicitrakan

secara negatif. Pencitraan negatif gubernur pada berita kedua dilakukan dengan menggambarkan gubernur sebagai inisiator RTRW dengan dalih sanksi yang diatur dalam perda sangat lemah. Namun pada bagian berikutnya diberitakan bahwa berdasarkan dua kali sosialisasi yang dilakukan pemerintah provinsi, sebagian besar yang diundang menyatakan revisi ini tidak lebih baik dari perda sebelumnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa revisi yang diajukan eksekutif merupakan suatu kemunduran karena mengandung “pasal bisnis” yang memberi peluang kepada investor untuk merambah kawasan yang selama ini disakralkan.

Selain itu, pemerintah juga digambarkan secara negatif, khususnya terhadap Ketua Bappeda Bali Nengah Suarca yang memberikan jawaban normatif mengenai prosedur penyusunan RTRWP, namuna ketika ditanya mengenai adanya “pasal bisnis” dalam RTRWP tidak menjawab secara rinci.

Pada berita ketiga juga terdapat menggambarkan secara negatif terhadap pemerintah, khususnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Buleleng I Putu Tastra Wijaya yang membenarkan adanya penyimpangan penerapan perda RTRW di wilayah Air Sanih, Tejakula, Buleleng. Dengan demikian, masyarakat digiring untuk memahami bahwa RTRWP yang ada memang tidak baik untuk kepentingan Bali dan pemerintah belum mampu merealisasikannya dengan baik.

Secara konsisten dalam setiap berita, *Bali Post* menggambarkan RTRW yang diajukan eksekutif secara negatif. Selain menggunakan strategi bahasa, dapat juga diamati berdasarkan pihak yang dihadirkan dalam teks berita. Yang dihadirkan secara positif dan ditonjolkan adalah pihak-pihak yang menentang atau tidak setuju dengan RTRW yang diajukan eksekutif, serta paparan mengenai penerapan RTRW yang tidak maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berita-berita tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali dalam harian *Bali Post* dibuat dengan struktur yang mencitrakan secara negatif RTRWP dan yang mengusulkannya, yakni pemerintah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Sebaliknya, yang menentang RTRWP dihadirkan secara positif di dalam berita, bahkan menjadi fokus pemberitaan dengan dijadikan teras berita atau mendapat porsi besar dalam berita. Struktur teks yang mengandung keberpihakan tersebut berada pada tataran struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

Pada struktur makro, pemilihan tema dan topik yang menggiring pemahaman pembaca untuk memahami informasi dengan cara tertentu sudah tampak pada judul berita. Subtopik yang tersaji pada bagian *story* atau tubuh berita mengandung informasi yang menjadi rincian serta argumen atas informasi yang disampaikan dalam judul yang menjadi topik.

Superstruktur berita-berita RTRWP Bali merepresentasikan arah pemberitaan yang telah tersirat pada struktur makro. Pemilihan *summary* yang meliputi judul dan teras berita, serta *story* yang meliputi penyampaian peristiwa utama, konsekuensi, konteks, historis, harapan, evaluasi, dan evaluasi verbal disesuaikan dengan pilihan struktur makro atau makna global berita tersebut. Dengan demikian, berita-berita tentang RTRWP Bali pada harian *Bali Post* memiliki superstruktur yang mencitrakan RTRWP Bali serta pemerintah provinsi Bali secara negatif.

Struktur mikro yang meliputi sintaksis, leksikon, koherensi, dan retorik juga merepresentasikan makna global berita. Pemilihan bentuk sintaksis tertentu merupakan cara wartawan dalam menonjolkan serta menyembunyikan pelaku, atau merupakan strategi untuk menekankan dan menyamarkan informasi tertentu. Pemilihan leksikon, bentuk koherensi tertentu, dan praanggapan juga merupakan strategi wartawan untuk membentuk dan

mengarahkan persepsi pembaca sehingga pembaca memiliki persepsi negatif tentang RTRWP Bali dan pemerintah provinsi Bali.

Kedua, kognisi sosial yang dicerminkan dalam berita RTRWP dalam harian *Bali Post* meliputi pengetahuan kelompok, pengetahuan nasional, dan pengetahuan kebudayaan. Yang tergolong pengetahuan kelompok, seperti *krama*, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan alam Bali, *bhisama*, PHDI, dan Pura *khayangan jagat*.

Yang tergolong pengetahuan nasional, antara lain pasal, RTRWP, Bali, ranperda, DPRD Bali, sanksi, perda, RTRW, Bali, eksekutif, UU, biro, HAM, ODTWK, ketentuan pembangunan di kawasan ODTWK, gubernur, bupati/wali kota. Sementara itu, pengetahuan kebudayaan yang terdapat dalam berita-berita tentang RTRWP di harian *Bali Post*, antara lain praktik membijaksanai aturan, pertimbangan ilmiah, kearifan lokal Bali, Danau Buyan, bukit/lereng bukit, menyasati aturan dan ketentuan.

Penggunaan jenis-jenis pengetahuan dalam berita mengenai RTRWP Bali pada harian *Bali Post* menggambarkan kognisi sosial yang tersirat dalam berita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harian *Bali Post* merupakan surat kabar yang menganut ideologi Pancasila dalam pemberitaannya, namun tidak terlepas dari ideologi kelompok tempat surat kabar tersebut diproduksi dan dikonsumsi, yakni budaya Bali yang dijawai oleh nilai-nilai agama Hindu.

Ketiga, konteks sosial yang digambarkan meliputi Pancasila, nilai lokal masyarakat Bali, struktur organisasi *Bali Post*, struktur organisasi pemerintah daerah Provinsi Bali, struktur *desa adat*, serta hubungan antara *Bali Post*, gubernur, DPRD Provinsi Bali, dan akademisi. Pancasila relevan sebagai konteks sosial mengingat negara Indonesia menganut ideologi Pancasila dan dasar negara. Di samping itu, *Bali Post* juga menggunakan Pancasila sebagai moto “Pengemban Pengamal Pancasila”. Hal ini dapat diamati dengan adanya argumen-argumen berdasarkan undang-undang, perda, gubernur, bupati/wali kota yang

menjadi ciri nilai-nilai Pancasila dan nilai demokrasi yang menjadi bagiannya. Nilai lokal masyarakat Bali sangat tampak dalam pemberitaan, yaitu dengan munculnya berita tentang konsep *tri hita harana*, *ajeg Bali*, *krama*, PHDI, *desa adat*, *bhisama*, dan kearifan lokal Bali.

Berdasarkan pengamatan terhadap berita-berita tersebut, diketahui hubungan antara *Bali Post*, Gubernur Bali, DPRD, dan akademisi yang tampak melalui strategi wacana yang terdapat dalam berita. *Bali Post* sebagai media yang independen dan mengusung ideologi Pancasila pada satu sisi, dan prinsip *ajeg Bali* pada sisi lain menggunakan kedua hal tersebut untuk mencitrakan pemerintah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali, baik dari sisi hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang maupun dari segi nilai lokal dan keyakinan masyarakat Bali. Dalam berita dihadirkan pula pernyataan yang dikutip secara langsung ataupun tidak langsung anggota DPRD dan akademisi mengenai topik yang diberitakan. Keseluruhan pernyataan DPRD dan akademisi tersebut mendukung pandangan bahwa RTRWP yang diajukan Gubernur Bali tidak baik untuk kepentingan Bali.

Analisis wacana kritis dengan menggunakan teori analisis wacana kognisi sosial yang dikemukakan van Dijk yang dilaksanakan masih perlu disempurnakan. Pada kesempatan ini, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan. Pertama, pengetahuan yang utuh mengenai teori yang diterapkan menjadi hal yang mendasar. Upaya memisahkan atau menerapkan sebagian saja dari teori ini akan mengurangi esensi teori ini. Selain itu, pengetahuan mengenai konteks sosial tempat teks itu dibuat dan dibaca juga penting untuk dianalisis dengan lebih baik.

Kedua, untuk melakukan analisis secara lebih komprehensif jumlah jumlah teks yang dianalisis perlu ditingkatkan lagi. Tujuannya agar simpulan penelitian lebih reliabel dan valid. Ketiga, jika dimungkinkan akan baik juga dilakukan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pemroduksi teks. Tujuannya adalah untuk mengetahui kognisi

sosial yang terdapat pada kesadaran pemroduksi teks meskipun hal ini tidak mutlak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi di Ablik Media: Pengantar kepada Kajian Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Meyer, Michael. 2001. *Between Theory, Method, and Politics: Positioning of the Approaches to CDA*. Dalam Ruth Wodak dan Michail Meyer. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: SAGE Publications.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- van Dijk, Teun A. 1983. “*Discourse Analysis: Its Deelopment and Application to the Structure of News*”. *Journal of Communication Spring*. Volume 33:2. pp:20 – 43.
- van Dijk, Teun A.(ed). 1985. *Handbook of Discourse Analysis Volume 1: Desciplines of Discourse*. London: Academic Press..
- van Dijk, Teun A. 1988a. *News as Discourse*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associaciates, Inc.
- van Dijk, Teun A. 1988b. *News Analysis: Case Studies of International News in The Press*. New Jersey : Lawrence erlabaum Associates.
- van Dijk, Teun A.. 1993. *Principles of Critical Discourse Analysis*. *Discourse&Society*. Vol.4(2): 249 – 283. London: SAGE.
- van Dijk, Teun A. 1995. *Discourse Analysis as Ideologi Analysis*. Dalam Schäffner C. & A. Wenden (Eds). *Language and Peace*. Aldershot: Dartmouth Publishing.
- van Dijk, Teun A.. 2001a. *Multidisciplinary CDA: a plea for diversity*. Dalam Wodak, Ruth dan Mayer, Michael. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: SAGE Publications Ltd.
- van Dijk, Teun A. 2001b. *Discourse, Ideologi, and Context*. *Forlia Linguistica*, XXX/1-2, p.11 – 40.

- van Dijk, Teun A. 2003. *The Discourse – Knowledge Interface*. In: Waiaess, G. and R. Wodak (eds.). *Multidisciplinary CDA*. London: Longman p. 85 – 109.
- van Dijk, Teun A. 2005. *Contextual Knowledge Management in Discourse Production*. Dalam Ruth Wodak dan Paul Chilton. *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- van Dijk, Teun A. 2006a. *Discourse and Manipulation*. *Discours & Society*. Vol 17 (2):359 – 383. London: SAGE Publications.
- van Dijk, Teun A. 2006b. *Discourse, Context, and Cognition*. *Discourse Studies*, Vol 8(1): 159 – 177. London: SAGE Publications.
- van Dijk, Teun A. 2008. *Discourse & Power*. New York: Palgrave Macmillan.